

**ANALISIS PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
TERHADAP PENURUNAN JUMLAH KEMISKINAN (Studi Kasus Kabupaten
Malang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Jember)**

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh:

RIZKI AMALIA SAFITRI
175020101111003



JUURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021

**ANALISIS PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
TERHADAP PENURUNAN JUMLAH KEMISKINAN (Studi Kasus Kabupaten
Malang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Jember)**

RIZKI AMALIA SAFITRI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: rizkiamaliasafitri1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Akses Fasilitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan terhadap Penurunan Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di 3 Kabupaten. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan model fix effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan variabel Alokasi Dana Desa dan Akses terhadap Fasilitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penurunan jumlah Kemiskinan di Kabupaten Malang Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Kemiskinan

A. PENDAHULUAN

Reformasi Indonesia yang dilakukan pada tahun 1999 juga berdampak pada reformasi keuangan daerah menyebabkan daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi yang sebelumnya diatur penuh baik dari sisi pemerintahan maupun pendanaanya oleh pemerintah pusat maka dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi mewajibkan setiap daerah untuk mengatur keuangannya sendiri. Dalam desentralisasi keuangan ke daerah, dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat pada daerah disebut dengan dana perimbangan. Terdapat poin baru dalam dana perimbangan yang ada di Indonesia yaitu Dana Desa, Dana desa merupakan salah satu dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat bersumber dari APBN kepada daerah pada tingkat pemerintahan terkecil yaitu Desa.

Dana desa merupakan dana transfer yang relatif baru dikucurkan oleh pemerintah pusat sejak adanya Undang Undang tentang Desa PDFTT pada tahun 2014 dan mulai dikucurkan ke desa pada tahun 2015. Sejak tahun 2015 sampai

tahun 2019 dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya. Selain Dana Desa pemerintah desa juga mendapatkan Alokasi dana desa, ADD merupakan salah satu dana transfer yang diperoleh pemerintah desa bahkan sebelum adanya dana desa, alokasi dana desa ditransfer oleh pemerintah kabupaten/kota yang selanjutnya diatur melalui peraturan bupati. Tingginya pendanaan yang diterima oleh desa baik dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa ini umumnya belum banyak berdampak pada masyarakat desa terutama untuk peningkatan kesejahteraan dan pengurangan jumlah kemiskinan, hal ini didukung dengan hasil penelitian dari LIPI pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa sebagian besar penduduk miskin yang ada di Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.

Tingginya kemiskinan yang ada di pedesaan yang ada di Indonesia menurut BAPPENAS disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat desa, kurangnya akses masyarakat desa terhadap pelayanan kesehatan serta mata pencaharian masyarakat desa sebagian besar berada di sektor informal seperti pertanian dan peternakan. Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar adalah Provinsi Jawa Timur, dimana Jawa Timur sendiri juga merupakan Provinsi penerima Dana Desa terbesar ke-dua di Indonesia. Tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Timur dari tahun 2015-2019 masih lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan nasional, yang digambarkan pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1 : Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur dan Nasional

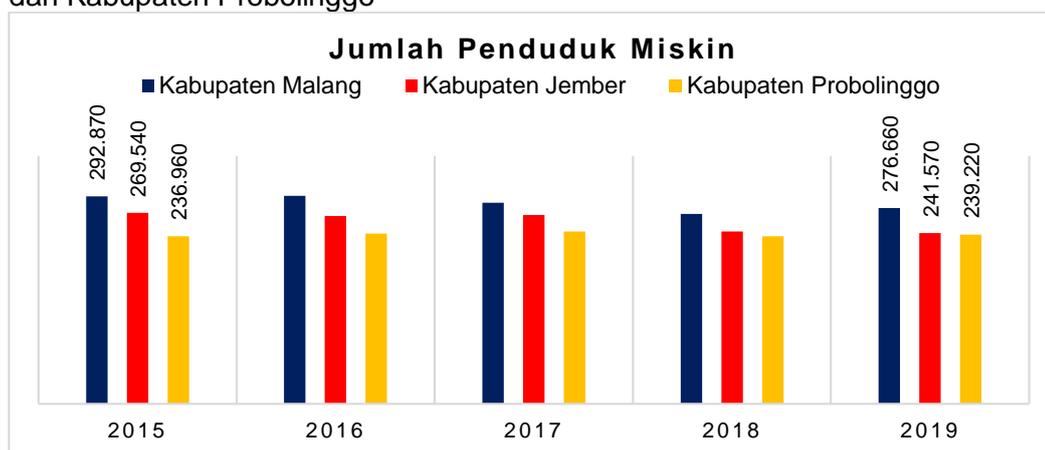


Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah

Masih tinginya tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur juga disebabkan karena masih Tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Tiga daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Timur adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan

Kabupaten Probolinggo. Tiga kabupaten ini merupakan kabupaten daerahnya didominasi dengan desa, dengan jumlah desa yang cukup besar pada masing-masing kabupaten. Jumlah penduduk miskin yang ada di tiga kabupaten ini pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini.

Gambar 1.2 : Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo



Sumber: DPMD Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo, Data diolah

Pada gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2019 masih sangat fluktuatif dan pada tahun 2019 masih mengalami peningkatan. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar pertama di Jawa Timur dan daerah penerima Dana Desa kedua terbesar di Jawa Timur. Kabupaten jember merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin kedua terbesar di Jawa Timur dan penerima dana desa terbesar ke-sembiilan di Jawa Timur. Kabupaten probolinggo merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar ke empat di Jawa Timur pada tahun 2019, selain itu Kabupaten Probolinggo merupakan kabupaten dengan jumlah dana desa terbesar pertama di Jawa Timur.

Dari latar belakang yang telah dipaparka sebelumnya seharusnya tingginya dana desa dan alokasi dana desa dapat mengurangi jumlah kemiskinan, selain itu peningkatan akses masyarakat pada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan seharusnya dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap program pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Arham,2017). Berdasarkan pada permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh antara Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Akses terhadap Fasilitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan terhadap Penurunan Jumlah Kemiskinan yang ada di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2019.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

Teori dasar yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori *fiscal federalism*, yaitu *second generation fiscal federalism* yang lebih mengedepankan tentang *revenue* dan *expenditure assignment* yang menganggap bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh pada perilaku pemerintah daerah. Adanya keterkaitan erat antara penerimaan dan pengeluaran daerah sebagai insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi lokal (Zaenuddin, 2012), selain itu sudut pandang dari teori *second generation fiscal federalism* adalah pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal jika terdapat peningkatan pendapatan dan kewenangan pemerintah daerah untuk membuat peraturan yang dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi lokal (Weingast*, p. 2006).

Teori Publik Finance

Dalam mengatur keuangannya terdapat fungsi fiskal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa terdapat 3 fungsi fiskal menurut Musgrave yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi menurut Musgrave adalah penyediaan barang publik oleh pemerintah, dimana barang publik ini merupakan barang atau layanan publik yang menyangkut kepentingan banyak orang. Fungsi distribusi yang harus dilaksanakan pemerintah menurut Musgrave yaitu mendistribusikan sumber sumber ekonomi kepada seluruh masyarakat. Fungsi stabilisasi merupakan fungsi pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian, yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen moneter dan instrument fiscal.

Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan pada desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten minimal 10%. Tujuan dari adanya Alokasi dana Desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan

perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

Teori Kemiskinan

Kemiskinan para ekonomi pembangunan adalah situasi ketidakmampuan yang sangat minim dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan (Todaro, 2000), menurut todaro penduduk miskin umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah perdesaan dengan mata pencaharian pokok di bidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lain yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional.

Akses Terhadap Fasilitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

Akses terhadap fasilitas dasar baik pendidikan dan kesehatan diartikan sebagai kemudahan masyarakat untuk mencapai suatu fasilitas dasar pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah minimal 1 sekolah dasar untuk 1 desa, minimal 1 sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan minimal 1 puskesmas pada setiap kecamatan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa yang terdapat di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo dengan jumlah (929 Desa) adapun periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama kurun waktu 2015 sampai 2019 atau selama 5 tahun. Dalam pengambilan sampel metode yang digunakan adalah metode purposive sampling dan metode slovin sehingga didapatkan 518 desa sebagai jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari DPMD. Data anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa, dummy akses terhadap fasilitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dan jumlah penduduk miskin.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis data panel data panel sendiri merupakan gabungan dari data time series (runtut waktu) dan data cross section (data yang dikumpulkan secara individu). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$\text{LogKM}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogDD}_{it} + \beta_2 \text{LogADD}_{it} + \beta_3 \text{LogDummy}_{it} + e_{it}$$

Dimana :

KM = Jumlah Penduduk Miskin

β_0 = Konstanta

- $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi
- e = *Error Terms*
- i = *Cross Section* di 518 Desa
- t = *Time Series* (2015-2019)
- DD_{it} = Dana Desa
- ADD_{it} = Alokasi Dana Desa
- Dummy = Akses terhadap Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Statistik dan Hipotesis

Dalam metode data panel terbagi menjadi tiga model yaitu common effect model, fix effect model dan random effect model. Dalam metode data panel diperlukan pengujian untuk memilih model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Uji Chow dan Uji Hausman

Uji Chow		Uji Hausman	
Effects Test	Prob.	Test Summary	Prob.
Cross-section F	0.0000	Cross-section random	0.0000
Cross-section Chi-square	0.0000		

Dari hasil pengujian Uji Chow diatas nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar $0.0000 < \alpha 0.05$, maka dari hasil ini menolak H₀ dan menerima H₁ yaitu *fix effect model* merupakan model terbaik dibandingkan dengan common effect model. Dari hasil uji hausman diatas untuk memilih model terbaik antara *random effect model* dan *fix effect model* dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar $0.0000 < \alpha 0.05$, maka dari hasil H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya fix effect merupakan model terbaik

Hasil Estimasi Model Fix Effect

Tabel 4.3: Hasil Pengujian Fix Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.356965	2.437867	1.377009	0.1687
LOGDD	0.198691	0.014591	13.61718	0.0000
LOGADD	-0.033219	0.125780	-2.640909	0.0417
DUMMY	-0.012483	0.325260	-2.383077	0.0394

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9.0

Dari hasil pengujian maka model yang terpilih adalah Fix Effect Model dengan persamaan regresi yang terbentuk dari fix effect model yaitu:

$$KM_{it} = 3.356965 + 0.198691 DD_{it} - 0.033219 ADD_{it} - 0.012483 Dummy_{it} + e_{it}$$

Uji Pengaruh Simultan

Uji pengaruh simultan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Akses terhadap fasilitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara bersamaan terhadap variabel terikat yaitu Kemiskinan di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo.

Tabel 4.4: Hasil Uji Simultan

F-statistic	8.667850
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9.0

Nilai f table yang didapatkan untuk penelitian ini adalah 2.60, dari hasil pengolahan data diatas maka nilai f hitung yang didapatkan yaitu $8.667850 > 2.60$, dengan nilai f table sedangkan nilai prob (F-statistik) sebesar $0.000000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 4.5: Hasil Uji Simultan

R-squared	0.685385
Adjusted R-squared	0.646313

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9.0

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa secara simultan variabel bebas yaitu dana desa, alokasi dana desa dan akses terhadap fasilitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan sebesar 68% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh error.

Uji Pengaruh Parsial

Uji pengaruh parsial dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji pengaruh secara parsial ini dilihat dari nilai probabilitas nilai t statistik pada masing- masing variabel.

Tabel 4.6: Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.356965	2.437867	1.377009	0.1687
LOGDD	0.198691	0.014591	13.61718	0.0000
LOGADD	-0.033219	0.125780	-2.640909	0.0417
DUMMY	-0.012483	0.325260	-2.383077	0.0394

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 9.0

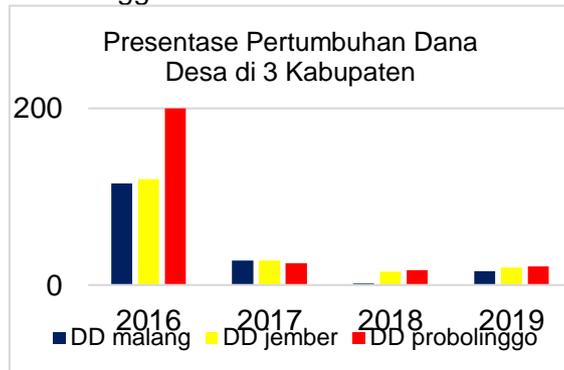
1. Nilai konstanta sebesar 3.356965, ketika variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dummy memiliki nilai konstan atau sama dengan nol maka nilai kemiskinan akan meningkat sebesar 3.351232.
2. Nilai koefisien regresi variabel Dana Desa sebesar 0.199 artinya ketika terjadi peningkatan Dana Desa sebesar 1% maka kemiskinan meningkat sebesar 19%. nilai probabilitas pada variabel dana desa sebesar $0.0000 < 0.05$ sedangkan nilai t hitung sebesar 13.61718 lebih besar dari nilai t table artinya dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
3. Nilai koefisien regresi variabel alokasi dana desa sebesar -0.033 artinya ketika terjadi peningkatan Alokasi Dana Desa sebesar 1% maka kemiskinan akan menurun sebesar 3%, probabilitasnya sebesar $0.0417 < 0.05$ dan nilai t hitung sebesar 2.64909 lebih besar dibandingkan dengan nilai t table sebesar sehingga variabel alokasi dana desa memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan.
4. Nilai koefisien regresi variabel dummy yaitu akses terhadap pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan meningkat sebesar 1% maka kemiskinan akan berkurang sebesar 1,2%. Variabel dummy nilai probabilitasnya sebesar 0.0394 lebih kecil dibandingkan dengan nilai derajat kepercayaan sebesar 0.05 dan nilai t hitung sebesar 2.383077 artinya variabel akses terhadap fasilitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan.

b. Pembahasan

Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo.

Dana desa merupakan salah satu anggaran yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat pada desa, dana desa pada tahun 2019 menurut Permendes PDTT no 16 tahun 2018 diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa belum dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan dan bahkan pada beberapa tahun masih terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Hasil pengujian pada metode *fix effect model* dimana Dana Desa memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan sebesar 19%. Jika dihubungkan dengan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *second generation fiscal federalism* dan teori fungsi alokasi menurut Musgrave. jika dilihat dari pertumbuhan dana desa seperti pada gambar di bawah ini

Gambar 4.8 Pertumbuhan Dana Desa tahun 2016-2019 di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo.



Sumber: DPMD, data diolah

Gambar 4.9: Pertumbuhan Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo tahun 2015-2019



Sumber: DPMD, data diolah

Dari gambar 4.8 diatas dapat dilihat jika pertumbuhan dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 peningkatan dana desa yang diterima sangat signifikan. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang ada di tiga kabupaten seperti pada gambar 4.13 dibawah ini

Jika dibandingkan pertumbuhan dana desa sangat tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk miskin di kabupaten malang, disebabkan prioritas penggunaan dana desa menambahkan prioritas yaitu kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa, Embung, dan Sarana olahraga Desa. Dana Desa di Kabupaten Malang relatif dapat mengurangi kemiskinan meskipun masih terdapat peningkatan jumlah kemiskinan. Penggunaan dana desa di kabupaten malang untuk produk unggulan desa yang ada di kabupaten malang seperti kopi tango karlos di karangploso dan pelabuhan ikan di sendang biru yang merupakan pengembangan dari potensi perikanan yang ada di desa. Kabupaten Jember jika dibandingkan persentase pertumbuhan dana desa di kabupaten jember sangat tinggi namun pertumbuhan jumlah penduduk miskin di kabupaten jember juga masih tinggi. Disebabkan oleh penyerapan anggaran dana desa yang ada di kabupaten jember masih kurang maksimal, kegiatan ekonomi yang ada di kabupaten jember lebih terpusat di daerah bekas administratif kota jember serta rendahnya inovasi pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desanya. Kabupaten Probolinggo persentase pertumbuhan dana desa di kabupaten probolinggo sangat tinggi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Disebabkan oleh penganggaran dana desa untuk program dan kegiatan yang ada masih digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, Dana desa di kabupaten

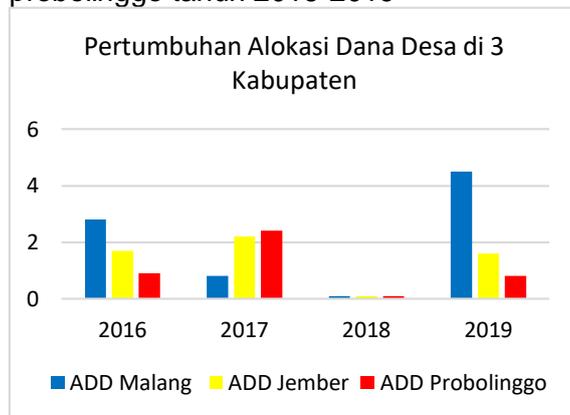
problinggo juga belum terserap secara maksimal, masih tingginya korupsi dana desa di kabupaten probolinggodan dan pemerintah desa belum memaksimalkan potensi yang ada seperti hutan bakau yang ada di pesisir kabupaten probolinggo.

Terdapat penelitian lain yang memiliki hasil yang sama yaitu penelitian dari Aslan, Dio Caisar Darma, Adi Wijaya yang menyatakan bahwa dana desa memiliki dampak signifikan positif terhadap kemiskinan disebabkan karena dana desa masih digunakan untuk pengembangan infrastruktur. Penelitian lainnya yaitu penelitian dari Satria aji imawan, Erwan agus purwanto yang menyatakan bahwa dana desa secara makro belum berdampak terhadap kemiskinan karena masih diprioritaskan untuk pembangunan infratraktur dibandingkan dengan pengembangansumberdaya manusia.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember Dan Kabupaten Probolinggo.

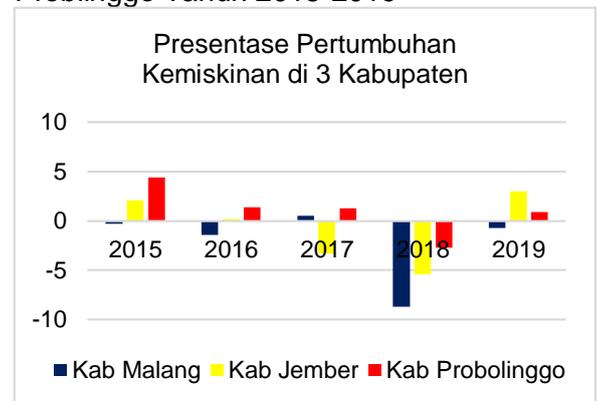
Penetapan Jumlah Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap perangkat desa dan ditambah dengan alokasi formula. Pada Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo jumlah alokasi dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah selalu meningkat sesuai dengan peningkatan dana perimbangan yang didapatkan oleh kabupaten-kabupaten tersebut, seperti pada grafik di bawah ini. Peningkatan jumlah alokasi dana desa yang stabil setiap tahunnya pada Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo berdampak pada pengurangan kemiskinan di 3 Kabupaten. hasil pengujian menggunakan model *fix effect* yang dapat dilihat melalui gambar 4.3. Dari hasil uji panel data alokasi dana desa memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan sebesar 3%. Pengaruh negatif alokasi dana desa terhadap kemiskinan sesuai dengan teori *fiscal federalism*. Pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan dapat dilihat dengan membandingkan antara presentase pertumbuhan alokasi dana desa dan presentase pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang ada di kabupaten malang, kabupaten jember dan kabupaten probolinggo.

Gambar 4.11: Presentase pertumbuhan alokasi dana desa di kabupaten malang, kabupaten jember dan kabupaten probolinggo tahun 2016-2019



Sumber: DPMD, data diolah

Gambar 4.12: Presentase Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Problinggo Tahun 2015-2019



Sumber: DPMD, data diolah

Dari dua gambar ini dapat dilihat jika Kabupaten Malang memiliki pertumbuhan Alokasi Dana Desa lebih besar dibandingkan dengan presentase pertumbuhan jumlah penduduk miskin di kabupaten malang. Disebabkan karena penggunaan alokasi dana desa sebagian besar untuk penyelenggaraan pemerintah desa, dari APBDesa yang ada di Kabupaten Malang belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa merupakan belanja yang paling sedikit dibandingkan dengan bidang lain, serta program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum optimal. Pertumbuhan alokasi dana desa di kabupaten jember lebih tinggi dibandingkan dengan presentse penurunan jumlah kemiskinan di kabupaten jember. Alokasi dana desa di kabupaten jember belum dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan karena sebagian besar digunakan untuk operasional pemerintah desa, pemerintah desa juga masih fokus pada bidang penanggulangan Bencana sehingga alokasi dana desa belum dapat difokuskan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan alokasi dana desa di kabupaten probolinggo tidak terlalu tinggi namun, pertumbuhan jumlah penduduk miskin di kabupaten probolinggo masih sangat tinggi. Penyebab yaitu penggunaan alokasi dana desa untuk kepentingan aparatur desa jauh lebih besar dibandingkan dengan kegiatan untuk masyarakat, dari data DPMD realisasi ADD yang digunakan untuk operasional pemerintah desa sebesar 65%. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat probolinggo masih rendah sehingga, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa juga masih rendah mengakibatkan pengalokasian alokasi dana desa belum maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Terdapat penelitian dari haryono umar mengenai hubungan antara sumberdaya manusia khususnya pada aparatur desa terhadap manajemen keuangan desa, bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh terhadap peningkatan sumberdaya manusia pada aparatur desa sehingga dalam jangka panjang dapat memperbaiki manajemen keuangan yang ada di desa sehingga anggaran alokasi dana desa dapat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Jurnal lainnya adalah jurnal yang ditulis oleh tizya alya arifia yang menyatakan bahwa alokasi dana desa memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa namun, dampaknya belum maksimal disebabkan karena partisipasi masyarakat dalam penegelolaan keuangan desa masih rendah.

4.3.3 Pengaruh Akses terhadap Fasilitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo.

Pengertian akses menurut Bappenas adalah kemudahan untuk mencapai sesuatu, dalam hal ini berkaitan dengan berbagai macam fasilitas kesehatan dan pendidikan. Akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan berkaitan erat terhadap kualitas sumberdaya manusia yang ada di masyarakat. Menurut kuncoro salah satu penyebab kemiskinan adalah kualitas sumberdaya manusia. Grafik dibawah ini menggambarkan jumlah fasilitas kesehatan pada masing-masing kabupaten. Pada grafik dibawah jumlah fasilitas kesehatan pada Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo sangat fluktuatif. Bappenas juga memaparkan mengenai akses terhadap fasilitas pendidikan, akses terhadap fasilitas pendidikan merupakan ketersediaan serta kemudahan masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan yaitu sekolah.

Gambar 4.5: Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo (Data Diolah)

Gambar 4.6: Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo (Data Diolah)

Grafik diatas menunjukkan jumlah sekolah swasta dan negeri pada setiap jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2015-2019. Pada grafik diatas jumlah Sekolah masih mengalami penurunan setiap tahunnya, penurunan ini sebagian besar terjadi pada sekolah swasta. Akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan modal manusia. Menurut Todaro pendidikan dan kesehatan dapat berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan dan juga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang. Selain itu rendahnya akses pendidikan dan kesehatan juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan menurut Bappenas salah satu penyebab tingginya kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu sulitnya mengakses layanan pendidikan karena hambatan geografis, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan rendahnya usia harapan hidup dan gizi buruk. Selain itu menurut penelitian dari Ribut Nurul Tri Wahyunia, Arie Damayanti dari BPS sebagian besar penduduk miskin dan hampir miskin berusia 15 tahun ke atas di Papua yang merupakan daerah dengan presentase kemiskinan terbesar di Indonesia tidak memiliki ijazah SD dan tidak memiliki akses terhadap air minum dan listrik.

Hasil pengolahan panel data menggunakan fix effect model untuk variabel dummy yaitu akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan sebesar 1,24%. Program-program pemerintah desa di Kabupaten Malang Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo di bidang pendidikan dan kesehatan seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan non formal milik desa, dukungan pendidikan bagi siswa miskin, pembangunan dan penyelenggaraan polindes. Pemerintah desa di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut di daerah mereka.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa:

- Dana desa memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan disebabkan karena prioritas penggunaan dana desa sebagian besar

digunakan untuk pembangunan modal fisik seperti infrastruktur belum dapat mengurangi kemiskinan

- Alokasi dana desa memiliki pengaruh signifikan negatif namun nilainya rendah terhadap jumlah penduduk miskin, karena program dan kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk operasional pemerintah desa baru sisanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
- Akses terhadap fasilitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh signifikan negatif sangat lemah terhadap jumlah penduduk miskin. Lemahnya pengaruh ini disebabkan karena pertumbuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rendah setiap tahunnya serta, pemanfaatan dan kualitasnya belum maksimal

Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yaitu:

- Pemerintah desa dapat memetakan potensi desanya dan mengembangkan potensi desanya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang ada di desa, serta desa dapat memaksimalkan penyerapan dana desa.
- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat ditingkatkan sehingga alokasi dana desa dapat lebih banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan aparatur desa
- Poskesdes dan puskesmas pembantu yang ada di desa dapat dimaksimalkan untuk melayani masyarakat yang ada di desa, terutama dari waktu operasional kegiatannya. Serta, kualitas pendidikan yang ada di desa dapat ditingkatkan terutama untuk desa-desa yang memiliki akses cukup sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Lewis, B. D. 2018. decentralizing to villages in indonesia: money and other mistakes. *publik administration and development*.
- Boonperm, J., Houghton, J., & Khandker, S. R. 2013. Journal of Asian Economics Does the Village Fund matter in Thailand ? Evaluating the impact on incomes and spending. *Journal of Asian Economics*, Vol.25, : 3–16.

- Imawan, S. A., & Purwanto, E. A. 2020. Governing Village Fund in Indonesia: Is It Erradicating Poverty? *Policy & Governance Review*, Vol.4, (No.1) : 14.
- Wibowo, H., Mulya, I. T., & Mujiwardhani, A. 2019. Dampak Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, Vol.1, (No.2) : 164–178.
- Utama, Z. S., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. 2017. Kebijakan Fiskal di Persimpangan, Pro Growth atau Pro Poor? *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, Vol.2, (No.2) : 67–81.
- World Bank. 2007. *Intergovernmental Fiscal Transfer Principles And Practice*. Washington.
- khusaini, m. 2018. *Keuangan daerah*. Malang: UB press.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: erlangga.
- Zaenuddin, H. M. 2012. *Isu, Problematika, Dinamika Perekonomian Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Oates, W. E. 1972. *Fiscal federalism*.
- Indonesia, K. K. 2017. *Buku Saku Dana desa*. Jakarta.
- indonesia, I. i. 2019. *Tinjauan kritis ketahanan sosial masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan*. Jakarta: LIPI press.
- Weingast, B. R. 2006. *Second Generation Fiscal Federalism: Implications for Decentralized Democratic Governance and Economic Development*.
- Gujarati, D.N & Porter, D.C. 2009. *Dasar-dasar Ekonometrika*
- Ekananda, M. 2014. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kementerian Desa PDPT. (2019). *Peraturan Menteri Desa dan Pdt Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Thun 2019*.http://jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1540785265_peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_16_tahun_2018.pdf. diakses pada 2 Mei 2020.
- Kementerian Keuangan. (2004). *UU No 33 tahun 2004*. : http://Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id/Attach/Post-Uu-No-33-Tahun-2004-Tentang-Perimbangan-Keuangan-Antara-Pemerintah-Pusat-Dan-Pemerintah-Daerah/UU-228-263-Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_33_Tahun_2004.pdf. diakses pada 18 april 2020.
- Kementerian Keuangan. (2014). Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- BPK. (2003). Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.https://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2012/03/UU_no_20_th_2003.pdf. diakses pada 20 maret 2021

BPK. (2009). Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>. diakses pada 20 maret 2021

Kementerian Keuangan. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi Anggaran*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/101~PMK.02~2011PerLamp%20III.htm>. diakses pada 1 sepetember 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Rincian alokasi dana desa provinsi/kabupaten/kota dalam apbn t.a. 2019*. Halaman, 1–14. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370>. diakses pada 18 april 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Rincian alokasi dana desa provinsi/kabupaten/kota dalam apbn t.a. 2018*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Rincian-Alokasi-TKDD-TA-2018-1.pdf>. diakses pada 18 april 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Rincian alokasi dana desa provinsi/kabupaten/kota dalam apbn t.a. 2016*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/RINCIAN>. diakses pada 18 april 2020.